

e-news letter

JAN III 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATAP

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Ansory Siregar, Lc

Fraksi PKS DPR
Gulirkan Hak Interpelasi
**Kenaikan Iuran
BPJS Kesehatan**

Pansus dan Interpelasi : Langkah Penting Hadirnya Keadilan Rakyat

Sebuah pepatah berbahasa Inggris menuliskan *“Whoever is careless with the truth in small matters can not be trusted with important matters.”* Siapapun yang ceroboh dengan kebenaran dalam hal-hal kecil tidak dapat dipercaya untuk hal-hal besar.

Politik sejatinya adalah menukar kepercayaan, sebelum kemudian dalam perkembangannya bergeser menjadi aktivitas transaksional. Saat motif ekonomi dan aroma kekuasaan lebih dominan dibandingkan menghadirkan kemaslahatan. Asumsi itu tumbuh dan semakin berkembang karena beberapa pihak memilih ingkar terhadap apa yang mereka sampaikan (campaign).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) secara resmi menggalang tanda tangan untuk mendorong DPR membentuk pansus Jiwasurya dan hak interpelasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Jazuli Juwaini langkah konstitusional ini ditempuh agar dapat mengungkap kasus secara

terang benderang dan komprehensif sehingga penyelesaian kasus tidak salah sasaran. Meski dalam prosesnya, banyak yang berbalik badan setelah paling

lantang menyampaikan perlu dibentuknya Pansus. Mengkerut dalam pilihan yang pragmatis damai; panja. Bukan peristiwa langka dalam politik, dilakukan oleh orang-orang yang sama. Anehnya mereka nyaman berselimut dalam rekam jejak (track record) kelam seperti itu.

Dengan sangat menyesal, Pemerintah telah ingkar janji setelah sempat menyatakan tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020. Padahal dalam prosesnya di sejumlah rapat ‘marathon’ dengan DPR, bahkan beberapa diantaranya

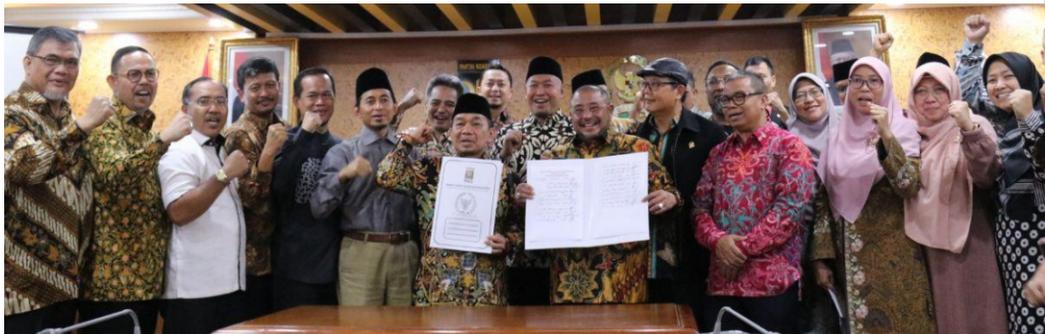
berlangsung hingga menjelang subuh Pemerintah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak akan naik terlebih bagi kelas III Mandiri. Namun apa yang terjadi sungguh mengecewakan, apa yang disampaikan tidak seperti apa yang dilakukan. Jika DPR sebagai representasi rakyat saja diingkari, lalu bagaimana dengan rakyat sebenarnya?

Terbersit dalam pandangan di depan, sejumlah komoditas mulai ambil ancap-ancang naik. BPJS dan Tol sudah naik, menyusul selanjutnya antrian kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Gas

welam 3 Kg, pakan ternak seperti jagung, dan sejumlah bahan pokok. Meninggalkan para pemilih suara dengan gegabah, mengaggap bahwa ini habis periode. Maka habis perkara dengan konstituen.

Kerja menghadirkan kebijakan yang berpihak memang bukan perkara mudah yang bisa dilakukan dalam satu dua hari atau semalam, namun langkah penting dan itikad baik akan mudah ditemukan jika sejak awal serius ditunaikan. Doakan kami tetap istiqomah.

Humas Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PKS RESMI GULIRKAN PANSUS JIWasRAYA DAN INTERPELASI BPJS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pembentukan Pansus Jiwasraya dan penggunaan Hak Interpelasi BPJS sangat penting agar dapat mengungkap kasus Jiwasraya secara terang benderang dan komprehensif serta agar dalam penyelesaian kasus ini tidak salah sasaran, tidak salah ungkap dan salah tangkap

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPRD DI



Fraksi PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwastara dan Interpelasi BPJS

Pembentukan Pansus Jiwastara dan penggunaan Hak Interpelasi BPJS sangat penting agar dapat mengungkap kasus Jiwastara secara terang benderang dan komprehensif serta agar dalam penyelesaian kasus ini tidak salah sasaran, tidak salah ungkap dan salah tangkap

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (15/1) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Pansus Jiwastara dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri. Peresmian dilakukan dengan Konferensi Pers dan penandatanganan dokumen pembentukan Pansus DPR RI (Rabu, 15/1).

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini insiatif Fraksi ini berdasarkan aspirasi rakyat saat Reses DPR. Rakyat

menginginkan agar DPR serius menyelidiki kasus Jiwastara dan merespon keras kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri yang sangat memberatkan.

"Kita mendapat banyak aspirasi rakyat selama masa reses kemarin untuk membongkar kasus Jiwastara yang bernilai triliunan, juga menangkap keberatan rakyat atas kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III mandiri. Dua kasus ini mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat

kecil. Jika borok-borok ini dipelihara dia akan merongrong kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS memutuskan secara resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwastara dan penggunaan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri karena senyatanya telah berdampak dan memberatkan rakyat.

Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat. "Pembentukan Pansus Jiwastara dan penggunaan Hak Interpelasi BPJS sangat penting agar dapat mengungkap kasus Jiwastara secara terang benderang dan komprehensif serta agar dalam penyelesaian kasus ini tidak salah sasaran, tidak salah ungkap dan salah tangkap," ungkapnya.

Selanjutnya, Fraksi PKS akan memperjuangkan dan mengajak sebanyak mungkin Anggota DPR lintas Fraksi untuk mendukung pembentukan



Pansus Jiwastara dan Interpelasi BPJS sehingga dapat segera disahkan di Paripurna DPR RI.

Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang turut hadir dalam konferensi pers menegaskan bahwa anggaran negara harus diperuntukkan oleh rakyat dan tidak membebani rakyat. "Jadi, kalau ada penyimpangan dan korupsi harus dibongkar" tegas Hidayat Nur Wahid.

Ada beberapa alasan mengapa kasus Jiwastara dan BPJS harus diurus. Jiwastara misalnya, memiliki potensi kerugian negara yang sangat besar, hingga mencapai Rp 13,7 Triliun. "Ini jauh lebih besar dari Bank Century" ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

Jiwastara masih memiliki utang dan liabilitas yang terus

meningkat dimana di bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp. 49,6 Triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwastara. Apalagi, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini. "Kami mencium adanya indikasi fraud yang terorganisir (organized crime) dan kecurangan di balik kasus Jiwastara sejak tahun 2013" jelas Ledia Hanifa.

Indikasi fraud yang berlangsung lama ini terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, kasus Jiwastara bersifat kompleks dan multidisiplin sehingga Fraksi PKS DPR RI akan mendorong terbentuknya pansus untuk mengutus kasus ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HNW: DPR Pernah Bentuk Pansus Pelindo II, Harusnya Jiwassraya juga

“Pansus ini bukan untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah, tetapi sebagai pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional kami selaku anggota DPR, terutama terkait fungsi pengawasan DPR

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (17/01) — Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mendorong DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan fungsi pengawasan dalam kasus Jiwassraya, bukan panitia kerja (panja) yang dilontarkan sebagian kalangan di DPR selama ini.

Hidayat menilai pembentukan pansus lebih tepat karena persoalan ini menyangkut lintas komisi yang ada di DPR, yakni Komisi III yang membidangi aspek hukum, Komisi VI yang membidangi aspek Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Komisi XI yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan sekaligus mitra dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Bila panitia kerja (Panja) yang dibentuk maka, berdasarkan aturan dan konvensi di DPR, hanya berkaitan dengan satu Komisi, sehingga pengawasan dan pengusutan tidak komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1).

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini merujuk kepada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2019 (UU Md3). Ketentuan itu berbunyi bahwa “Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat

mendesak atau memerlukan penanganan segera”.

Selain itu, ada pula Pasal 96 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi, ‘Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Hidayat berpendapat pilihan untuk membentuk Pansus sangat tepat mengingat dugaan kerugian negara yang dialami dalam kasus Jiwassraya ini cukup besar. Bila berkaca kepada pengalaman sebelumnya, dalam Kasus Century dan Kasus Pelindo II yang nilainya lebih kecil dari Kasus Jiwassraya saja DPR membentuk Pansus.

“Berdasarkan penelusuran Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Itu pun baru potensi kerugian negara awal, sehingga bisa lebih besar dari itu. Kerugian tersebut lebih besar dari Kasus Century yang mencapai Rp 6,7 triliun atau kasus Pelindo II yang mencapai Rp 6 triliun,” tukasnya.

la menjelaskan bahwa pembentukan Pansus Jiwassraya untuk menyelesaikan persoalan secara utuh dan komprehensif, bersama dengan proses



penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. “Proses hukum bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Selanjutnya, Hidayat menambahkan bahwa upaya untuk membentuk Pansus ini juga telah disampaikan oleh Fraksi PKS sebagai oposisi yang konstruktif bagi pemerintah sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.

“Pansus ini bukan untuk menjatuhkan kekuasaan

pemerintah, tetapi sebagai pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional kami selaku anggota DPR, terutama terkait fungsi pengawasan DPR,” tegasnya.

“Pembentukan Pansus juga sebagai bukti PKS perjuangannya aspirasi rakyat yang menginginkan agar dugaan korupsi dan masalah Jiwassraya diselesaikan secara tuntas dan komprehensif,” tutup Hidayat.

Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam

Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almsyahhari mengatakan wilayah perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar tidak ada pihak asing yang melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut. Ia mengatakan prinsip penjagaan di perairan Indonesia yang wajib menjaga adalah Bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut.

“Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga

mereka enggak akan masuk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan sebelum Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2019).

Kharis menegaskan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Karenanya, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika dan Intelijen ini mendukung usulan penambahan anggaran Badan

Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.

Kendati belum menerima usulan tersebut dalam APBN-Perubahan 2020, menurutnya penambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard). “Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebagaimana diketahui, perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia. Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang.

Namun tak lama berselang, kapal coast guard dan nelayan China kembali



terlihat memasuki ZEE Indonesia pada Sabtu (11/01/2020). Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun – 359 bersama KRI Jhon Lie – 358 dan KRI Karel

Satsuitubun – 356, bertemu enam kapal coast guard China, satu kapal pengawasan perikanan China dan 49 kapal nelayan pukat China. (ann/sf)

Foto : dpr.go.id

MENGAPA HARUS MEMBELA NATUNA

BERDAULAT TANPA SYARAT

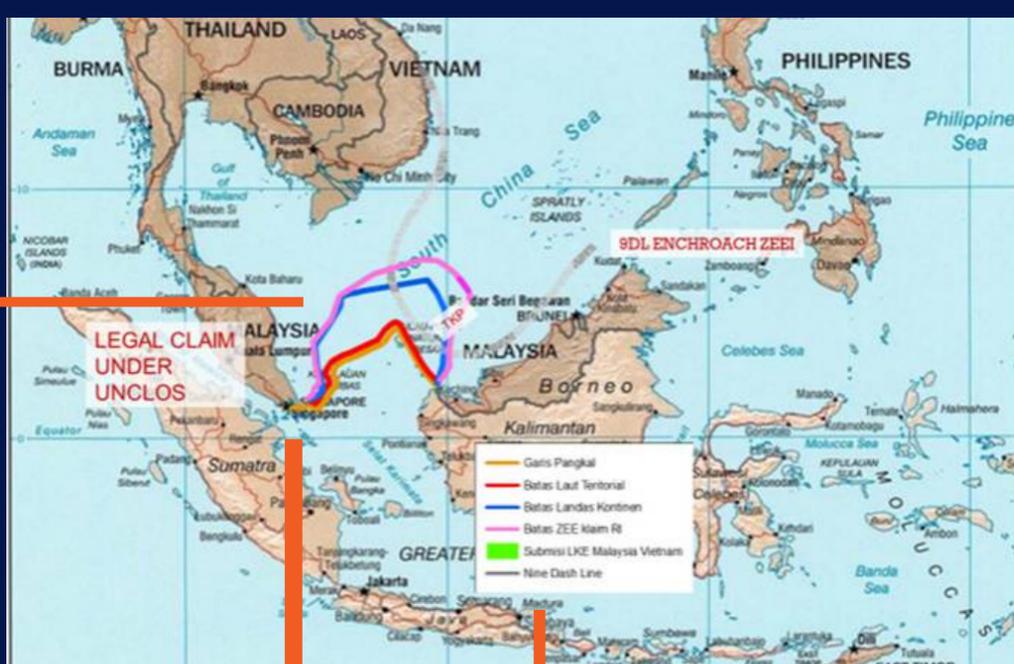
Laut Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia!

Kepulauan Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan United Nation Convention of the Law of Sea (UNCLOS) 1982. Hanya Indonesia yang berhak mengelola dan mengeksploitasi potensi ekonomi di Laut Natuna Utara.



LOKASI STRATEGIS

Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara terletak di jalur perdagangan internasional dan merupakan pintu gerbang menuju Laut Cina Selatan.



POTENSI ENERGI

Potensi volume gas di Natuna mencapai 222 TCF (Triliun kaki kubik), terbesar di Indonesia dengan nilai sekitar Rp. 6.000 Triliun.



POTENSI EKONOMI

Laut Natuna Utara kaya akan biota laut dengan potensi produksi perikanan mencapai sekitar 403.370 ton/per tahun.

MEMBERI RASA AMAN NELAYAN

Semenjak adanya kapal nelayan asing di Laut Natuna, nelayan Indonesia kerap diganggu dan dicegah untuk melaut.



China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spratly lalu diklaim sebagai wilayah ZEE-nya

Maret, kapal ikan ilegal asal China masuk ke Perairan Natuna

31 Desember, kapal penangkap ikan dan coast guard China melakukan pelanggaran ZEE

2009

2016

2019





Interupsi pada Sidang Paripurna:

Tidak Ada Kompromi Untuk Kedaulatan Natuna

“Saya harap Pimpinan mengkomunikasi hal ini ke Pemerintah. Jangan hanya karena investasi China kita berkompromi dengan urusan kedaulatan. Pertemanan kita junjung tinggi, tetapi kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,”

Dr. H. SUKAMTA

Anggota Komisi I DPR RI

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak kompromi dengan China terkait kedaulatan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun China telah menamakan investasinya di Indonesia, Pemerintah tetap diminta tegas jika berurusan dengan kedaulatan wilayah Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, pascakunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal coast guard China dan nelayan China menghilang. Namun belakangan mereka kembali lagi selang beberapa hari setelah kunjungan Presiden

Jokowi. “Seharusnya China itu menghargai kedaulatan wilayah kita. Menurut saya ini soal kedaulatan NKRI tidak bisa kita abaikan, tidak bisa dikompromikan,” ujar Sukamta saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sukamta juga memberi masukan agar tidak lebih dari satu pintu dalam penanganan pengamanan di wilayah laut. Ia menilai lembaga yang mengurus laut ini sudah sangat banyak, sehingga sering tumpang tindih. Ia mengkritik bahwa banyak miskordinasi di dalam mengatur keamanan laut Indonesia. Hal itu menurutnya

harus segera dibenahi dengan UU tunggal.

“Banyak lembaga yang ditugasi mengatur keamanan laut, tetapi semuanya belum terkoordinasi. Sungguh sangat baik kita punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut. Bukan seperti hari ini, banyak, tetapi fungsinya tidak ada,” kritik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Lalu, ia meminta Pimpinan DPR RI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah guna mengingatkan agar tidak berkompromi dengan China hanya karena China sudah berinvestasi di Indonesia. Hal itu bertujuan agar China benar-benar menghormati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Saya harap Pimpinan mengkomunikasikan hal ini ke Pemerintah. Jangan hanya karena investasi China kita berkompromi dengan urusan kedaulatan. Pertemanan kita junjung tinggi, tetapi kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” pungkask legislator dapil DI Yogyakarta itu. (hs/sf)

Foto : dpr.go.id

Toriq Hidayat: Pemerintah Pastikan Dana Asabri Disalurkan Bagi kesejahteraan Anggota

“Jangan sampai timbul rasa ketidakpercayaan para prajuri TNI dan anggota POLRI kepada pemerintah yang mengakibatkan kurangnya soliditas dalam menjaga keamanan negara, sehingga timbul rasa tidak aman pada masyarakat”

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (14/01) — Pada Pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II DPR RI (13/01/2020) hampir sebagian besar anggota menyoroti permasalahan Kasus Asuransi, terutama Asuransi Jiwasraya dan yang terbaru kasus ASABRI.

Anggota DPR RI, khususnya dari PKS meminta agar segera dibentuk Pansus terkait permasalahan Asuransi ini karena menyangkut kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia kepada Pemerintah khususnya BUMN.

Toriq Hidayat yang hadir pada pembukaan Sidang Paringpurna mengatakan kondisi ini ironis dan menyakitkan, disaat saudara-saudara kita

para prajurit TNI dan POLRI diberikan tanggungjawab besar menjaga keamanan negara, dengan fasilitas kesejahteraan yang belum layak, namun disisi lain dibuat khawatir dengan Kasus Asabri.

“Perlu diingat bahwa gaji para prajurit TNI, anggota POLRI dan PNS Kemhan/POLRI dipotong untuk iuran pesiun yang kemudian dikelola oleh ASABRI, demi kesejahteraan mereka dan keluarga dimasa yang akan datang”, ungkap Toriq.

Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1971 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/POLRI dengan

cara memberikan proteksi (perlindungan) finansial kepada Mereka.

Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT. Asabri (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotong royongan, dimana yang muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi.

“Tujuan yang mulia dari dirikannya Asabri ini harusnya membuat para prajurit TNI dan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena ada jaminan untuk diri dan keluarga mereka dimasa yang akan datang”, tambah Toriq, anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS.

Sementara asumsi nilai kerugian Asabri, bahkan disebut-sebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak kalah besar dengan Jiwasraya, yakni mencapai Rp 10 triliun di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu.

Toriq mengkhawatirkan jika kondisi ini sampai menimbulkan permasalahan



hati.

“Jangan sampai timbul rasa ketidakpercayaan para prajuri TNI dan anggota POLRI kepada pemerintah yang mengakibatkan kurangnya soliditas dalam menjaga keamanan negara, sehingga timbul rasa tidak aman pada masyarakat”, pungkasnya.

Oleh karena itu, Toriq menyatakan hendaknya apa yang akan dilakukan Mahfud MD selaku menkopohukam untuk bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulayani, dan Menteri BUMN, Erick Tohir agar segera dilakukan. Supaya

masalah ini jelas.

“Jika kasus ASABRI Jelas dan benar ada kerugian, maka harus dilakukan proses penegakan hukum yang cepat terhadap oknum direksi yang lakukan fraud, miss management maupun dugaan korupsi yang merugikan negara. Berikutnya pemerintah harus memastikan dana kesejahteraan para prajurit TNI, anggota POLRI dan PNS Kemhan/Polri dilindungi dan disalurkan sebagaimana mestinya kepada anggota”, tutup Toriq Hidayat.

Komisioner KPU Tersangka Suap KPK, Anggota Komisi 2 Nyatakan Kekecewaannya

"Kejadian ini sangat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan kredibilitas KPU secara kelembagaan. KPU sebagai lembaga yang independen dan mengedepankan integritas ternyata telah meruntuhkan integritas moral nya sendiri dengan praktik korupsi.

TEDDY SETIADI, S.I.Kom.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (14/01) — Menyikapi penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teddy Setiadi Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PKS menyatakan kekecewaannya, terlebih lagi KPU adalah mitra kerja komisi 2 DPR RI.

"Kejadian ini sangat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan kredibilitas KPU secara kelembagaan", ungkap Teddy di sela-sela kunjungannya ke Daerah pemilihannya di Kota

Bandung.

Menurut Teddy, KPU sebagai lembaga yang independen dan mengedepankan integritas ternyata telah meruntuhkan integritas moral nya sendiri dengan praktik korupsi.

KPU merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI, oleh karenanya pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Sebab, hal ini bertolak belakang dengan semangat KPU yang ingin melarang mantan napi kasus korupsi maju dalam

pilkada.

Dalam hal ini Teddy Setiadi menyampaikan pula komitmen PKS untuk menjadi Good Party Governance , kemampuan partai politik memberikan pengelolaan partai yang baik untuk kepentingan rakyat, terutama dalam melahirkan pejabat publik yang berkualitas dan amanah.

"Meskipun komisioner KPU bukan berasal dari partai politik, tetapi ini menjadi peringatan bagi kita semua. Baik berpartai maupun non partai ada saja godaan perilaku korupsi", pungkasnya.

Oleh karena itu, komitmen PKS dalam pengelolaan partai politik yang baik diharapkan dapat melahirkan pejabat-pejabat publik yang berkualitas dan amanah serta menghadirkan iklim demokrasi yang lebih sehat dan lebih bertanggungjawab," tutup Teddy



PKS Minta Kasus Suap Wahyu Setiawan Dibongkar Hingga Tuntas

Kasus ini perlu dibuat terang benderang. Perkara Pansus, jika disetujui oleh mayoritas fraksi bisa jalan. Tapi fokus pada penyelesaian kasus OTT ini dulu

Dr. H. MARDANI, M.Eng.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (11/01) — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar hingga tuntas kasus suap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait proses PAW anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Hal itu dikatakan Mardani menanggapi adanya usulan bahwa DPR RI harus membentuk Pansus Pemilu pasca OTT KPK terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

"Dibongkar sampai tuntas saja kasus ini dulu," kata Mardani kepada AKURAT.CO, Jakarta, Sabtu (11/1/2019).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, terlalu dini untuk membahas pembentukan

Pansus Pemilu. Saat ini, semua pihak terutama KPK harus tuntaskan kasus suap komisioner KPU dan kader PDIP tersebut.

Meski demikian, Pansus bisa saja jalan apabila mayoritas anggota Fraksi DPR RI menyetujuinya.

"Kasus ini perlu dibuat terang benderang. Perkara Pansus, jika disetujui oleh mayoritas fraksi bisa jalan. Tapi fokus pada penyelesaian kasus OTT ini dulu," pungkasnya.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pada proses PAW anggota DPR RI dari PDIP, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau

orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), kader PDIP Harun Masiku (HAR), dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

KPK juga telah menahan Agustiani di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK dan Saeful di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK lama. Untuk tersangka Harun, KPK masih mengimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri.

Selain itu, kasus tersebut juga menyeret nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun sebagai anggota DPR RI PAW.

Foto : dor.go.id



Menurunnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, Jadi Perhatian Surahman Hidayat

Karena independensi KPU yang dipilih pun dipertanyakan, apalagi banyak eks KPU yang menjadi kader bahkan petinggi partai politik setelah tidak menjabat lagi. Ini sangat memungkinkan karena jumlah partai politik peserta Pemilu sudah sangat berkurang tidak seperti Pemilu Tahun 1999

Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (15/01) — Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi 2 (15/1), DKPP menyampaikan pada Tahun 2019 menangani 331 perkara, dari perkara yang ditangani pada Tahun 2019, DKPP telah memutus 255 perkara dengan 1.093 teradu. Sedangkan 76 perkara masih proses pemeriksaan hingga tahun 2020.

Putusan DKPP pada tahun 2019 telah merehabilitasi 648 Teradu atau 57,7%. Sisanya dijatuhi sanksi Peringatan/Teguran sebanyak 387 Teradu, Pemberhentian Tetap 43 Teradu, Pemberhentian dari Jabatan Ketua 12 Teradu, dan Pemberhentian Sementara 3

Teradu.

Anggota DPR RI Surahman Hidayat melihat kondisi ini sangat memprihatinkan, karena dari kasus yang sudah diputus, 43% dijatuhi sanksi mulai peringatan sampai dengan pemberhentian.

"Ini memperlihatkan rendahnya integritas dan kredibilitas lembaga KPU, ditambah dengan banyaknya komisioner KPU Pusat sampai dengan daerah yang terjerat kasus korupsi. Perlu langkah perbaikan mendasar atas kondisi tersebut" ujar Surahman Hidayat.

Diperlukan revisi Undang-Undang Pemilu, Surahman Hidayat mengusulkan ke depan

KPU berasal dari perwakilan partai politik peserta pemilu saja, sebagaimana pemilu tahun 1999 yang terbukti hasilnya bagus yang pertama pasca reformasi.

"Karena independensi KPU yang dipilih pun dipertanyakan, apalagi banyak eks KPU yang menjadi kader bahkan petinggi partai politik setelah tidak menjabat lagi. Ini sangat memungkinkan karena jumlah partai politik peserta Pemilu sudah sangat berkurang tidak seperti Pemilu Tahun 1999", pungkasnya.

Lebih lanjut Surahman Hidayat mengusulkan partai peserta pemilu memilih perwakilannya untuk menjadi anggota KPU, yang berasal dari kalangan akademisi ataupun praktisi yang dianggap mempunyai kapasitas dan integritas dalam menyelenggarakan pemilu yang murah, sederhana dan demokratis.

"KPU RI hanya perwakilan partai politik yang memiliki kursi DPR RI, sedangkan KPU Provinsi perwakilan partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi, begitupun dengan KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota KPU yang



semakin banyak tidak menjadi soal, sebab tidak perlu mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang sekarang, sehingga tidak membebani anggaran negara. Di tingkat PPK, sampai tingkat KPSS dilakukan hal yang sama. KPSS nantinya tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga sebagai saksi partai politik. Ini bisa mengurangi biaya politik

peserta pemilu, karena tidak lagi harus pusing menyiapkan biaya saksi", ungkap Surahman.

Surahman Hidayat menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu bukan wasit, yang bertindak sebagai wasit adalah Bawaslu, jadi KPU berasal dari perwakilan partai politik sebuah hal yang wajar.

Foto dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Soal Korupsi Jiwasraya, Habib Aboe: Kejakgung Harus Transparan

"Apapun yang terjadi, kita (F-PKS) akan berjuang semaksimal mungkin, dengan jumlah yang ada. Kita juga akan road show ke fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, apakah NasDem, Gerindra, PAN dan Demokrat. Kita coba dulu menggalang dukungan. Ada pun keberhasilan, itu urusan politik

Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E.

Anggota Komisi III DPR RI

Soal Korupsi Jiwarsaya

Habib Aboe: Kejakgung Harus Transparan

“Apapun yang terjadi, kita (F-PKS) akan berjuang semaksimal mungkin, dengan jumlah yang ada. Kita juga akan road show ke fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, apakah NasDem, Gerindra, PAN dan Demokrat. Kita coba dulu menggalang dukungan.

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (17/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi berharap jajaran Kejaksaan Agung (Kejakgung), diberi keberanian untuk membuka secara transparan, apa pun yang terjadi dan kemana saja alur keuangan Jiwarsaya itu berjalan dan bergerak bisa dibuka secara tuntas dan jelas.

“Dan ini tidak boleh ada tekanan apa pun maupun ketakutan dari siapa pun. Ini yang kita harapkan dari Kejaksaan Agung,” kata Aboebakar kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarananya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

Kamis (16/1/2020).

Apalagi, sebut Ketua MKD DPR itu, jajaran Kejakgung telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus gagal bayar dana nasabah Jiwarsaya tersebut.

Namun menurutnya, bukan saja penetapan tersangka yang penting, tetapi yang lebih utama memastikan pengembalian dana nasabah Jiwarsaya dengan penanganan kasus ini.

“Kalau yang dilakukan Kejaksaan merupakan langkah amanah yang diberikan, sebab KPK dan Polisi tidak mengambilnya. Kejaksaan pasti mengambilnya, itu merupakan kebijakan hukum dan politik, jadi silahkan Kejaksaan melanjutkan dan kita berharap akan berjalan baik,” kata Habib

Aboebakar, demikian sapaan akrab politisi dari F-PKS itu.

Terkait dengan sikap fraksinya, Habib Aboebakar mengatakan kalau fraksi sesuai dengan sikapnya, yakni tetap menginginkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwarsaya.

“Apapun yang terjadi, kita (F-PKS) akan berjuang semaksimal mungkin, dengan jumlah yang ada. Kita juga akan road show ke fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, apakah Nasdem, Gerindra, PAN dan Demokrat. Kita coba dulu menggalang dukungan. Ada pun keberhasilan, itu urusan politik,” tegasnya.

Ketua DPP PKS bidang Dakwa Wilayah Kalimantan itu juga menegaskan bahwa fraksinya tidak pernah ikut, apa lagi menyetujui dibentuknya Panja Jiwarsaya, sebagaimana kabar yang sempat beredar, khususnya di Komisi VI DPR RI.

“Ndak ada. Itu diglobalisir aja. Yang benar itu, PKS pada keputusannya untuk mendorong pembentukan Pansus Jiwarsaya. Intinya, fraksi PKS tetap mengusulkan pembentukan Pansus,” pungkas Habib Aboebakar.



Korupsi Jiwasraya, Nasir Djamil Apresiasi Gerak Cepat Kejaksaan Agung

“Gerak cepat dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya patut kita beri apresiasi, karena jumlah kerugian negara dalam kasus ini sangat fantastis. Penetapan sejumlah tersangka dan penahanan yang dilakukan pada hari ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung untuk membongkar mega skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS

Jakarta (15/01) — Anggota Komisi III DPR-RI, M.Nasir Djamil mengapresiasi gerak cepat Kejaksaan Agung dalam menangani dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kejaksaan Agung kemarin telah menetapkan tiga tersangka yaitu Benny Tjokro Saputro (pemilik PT Hanson International Tbk), Hary Prasetyo (Mantan Direktur

Kuangan PT Asuransi Jiwasraya) dan Heru Hidayat (Pemegang Saham PT TRAM Tbk).

“Gerak cepat dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya patut kita beri apresiasi, karena jumlah kerugian negara dalam kasus ini sangat fantastis. Penetapan sejumlah tersangka dan penahanan yang dilakukan

pada hari ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung untuk membongkar mega skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya,” imbuh Nasir.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini berharap penetapan tersangka tidak berhenti pada ketiga nama diatas, semua pihak yang memiliki andil dalam kerugian negara dalam kasus ini (red: korupsi Jiwasraya) harus memberikan pertanggung jawaban secara hukum.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada penempatan dana investasi atau saham tidak valid dan objektif. Dimana PT Jiwasraya masuk kepada saham-saham berkualitas rendah yang tidak likuid sehingga menimbulkan kerugian dan gagal bayar. Nah penempatan saham yang dilakukan oleh beberapa Manager Investasi (MI) patut juga diusut dan dimintakan pertanggungjawaban jika ada prosedur dan aturan yang dilanggar,” pungkasnya.

Selain itu, Nasir Djamil meminta Kejaksaan Agung mempertimbangkan untuk



menerbitkan surat pencekalan kepada nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka guna mencegah para terduga pelaku korupsi Jiwasraya melarikan diri keluar negeri.

Dirinya juga berharap Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan PT Jiwasraya guna kepentingan para nasabah.

“Jika pencekalan dapat mendukung proses penyelidikan, maka hal tersebut wajib dilakukan oleh Kejaksaan. Kemudian diluar ranah hukum, Kementerian BUMN perlu mengambil langkah-langkah jitu guna penyelamatan PT Jiwasraya demi kepentingan para nasabah,” tutup Nasir.

DPR Kritik Seleksi Calon Hakim Agung

Jakarta (16/01) — Rapat dengar Pendapat DPR RI dengan Komisi Yudisial dengan agenda seleksi calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung dihujani keritik tajam oleh hampir semua anggota komisi III DPR RI.

Para anggota memberikan catatan terkait proses seleksi hakim agung diantaranya meminta Komisi Yudisial untuk lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standar kompetensi dan kepribadian, scoring serta

parameter track record calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Anggota DPR RI Banten 1, Dimiyati menyatakan perlunya dalam seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc menentukan scoring yang jelas dan transparan, sehingga dapat terukur mana calon hakim yang memiliki kompetensi yang layak.

"Selain itu harus juga dibuat standarnya agar para calon hakim mengetahui kompetensi apa yang harus mereka miliki dan disiapkan," ujar Dimiyati.

USULAN CALON HAKIM AGUNG

Dalam RDP tersebut kata Dimiyati, Komisi Yudisial mengusulkan 10 nama calon hakim agung, diantaranya:

1. Soesilo, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Sugjarto, S.H., M.H.
3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
4. Drs. Busra, S.H., M.H.
5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
6. Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.
7. Dr. Agus Yuniato, S.H., M.H.
8. Ansori, S.H., M.H.
9. Dr. Willy Fabrianto, S.H., M.Hum.
10. Sugjanto, S.H., M.H.



Perlunya dalam seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc menentukan scoring yang jelas dan transparan, sehingga dapat terukur mana calon hakim yang memiliki kompetensi yang layak. Selain itu harus juga dibuat standarnya agar para calon hakim mengetahui kompetensi apa yang harus mereka miliki dan disiapkan,

Dr. H.R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH

Anggota Komisi II DPR RI

Naiknya Harga Jagung, Pemerintah Gagal Kelola Stok

Kegagalan mengelola stok jagung tersebut akan berdampak pada kenaikan harga daging ayam dan telur. Kenaikan harga daging dan telur ini tentu akan berkontribusi pada angka inflasi

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (17/01) — Anggota Komisi 4 DPR Hermanto menilai Pemerintah gagal dalam mengelola stok jagung untuk pakan ternak. Indikatornya, harga jagung pakan meningkat sejak pekan ketiga Desember 2019 dan hingga saat ini belum kembali normal.

"Kegagalan mengelola stok jagung tersebut akan berdampak pada kenaikan harga daging ayam dan telur. Kenaikan harga daging dan telur ini tentu akan berkontribusi pada angka inflasi", papar Hermanto menanggapi harga jagung pakan yang naik belakangan ini. Ketua Umum Asosiasi

Peternak Layan Nasional Musbar Mesdi melaporkan, harga jagung pipil kering saat ini berkisar Rp 4.700–Rp5.200 per kilogram di berbagai daerah. Adapun harga normal jagung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 dipatok di angka Rp3.150–Rp4.000 per kilogram untuk jagung pipil kering dengan kadar air 15 persen.

Dewan jagung mengungkapkan, kebutuhan jagung untuk pakan berkisar 1 juta - 1,2 juta ton per bulan. Sementara itu pihak Kementerian Pertanian menilai kondisi produksi dan pasokan

jagung saat ini tergolong aman.

"Kalau pasokan aman sementara harga jagung naik, berarti ada yang salah dalam manajemen stok", ucap legislator dari FPKS ini.

Karena itu, Hermanto mendesak pemerintah agar segera melakukan pembenahan manajemen stok agar harga jagung kembali normal.

"Segera lakukan pembenahan agar harga kembali normal sesuai Permendag Nomor 96 Tahun 2018", pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

foto :
dpr.go.id



Perhatian Andi Akmal Pasluddin terhadap Kelangkaan Pupuk di Dapilnya

Dalam kunjungan kerja kami, utamanya di Kabupaten Bone dan Wajo, yang banyak dikeluhkan ini terkait masalah distribusi pupuk. Saat dibutuhkan, barangnya tidak ada padahal pupuknya ini sudah mau digunakan. Banyak kelompok petani juga yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

Kab. Wajo (16/01) — Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, kecewa karena masih banyak petani yang tidak mendapatkan subsidi pupuk. Dia menerangkan, selama kunjungan kerja reses sepanjang Desember-Januari ini, petani masih banyak yang menjerit lantaran tidak mendapat pasokan pupuk sebagaimana mestinya.

"Dalam kunjungan kerja kami, utamanya di Kabupaten Bone dan Wajo, yang banyak dikeluhkan ini terkait masalah distribusi pupuk. Saat dibutuhkan, itu barangnya tidak ada padahal pupuknya ini sudah mau digunakan. Banyak kelompok petani juga yang tidak

mendapatkan alokasi pupuk subsidi," kata Akmal, Senin (13/1).

Hasil investigasinya, politisi senior PKS ini menemukan banyak masalah didistribusi pupuk ini karena lemahnya pengawasan, utamanya dari pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Holding Pupuk Indonesia. Pupuk yang harusnya dialokasikan untuk petani tanaman pangan, malah dialokasikan untuk tanaman perkebunan.

"Jadi banyak permainan di pupuk ini terutama distributor dan pengecer karena kurangnya pengawasan. Di sini Kementan dan PT Pupuk, pemerintah daerah kurang maksimal dalam

melakukan pengawasan terhadap pupuk ini sehingga banyak salah sasaran," katanya.

Dia menduga, permainan ini sebagai akibat dari murahnya pupuk subsidi bagi petani. Pupuk yang harusnya dijual ke petani karena margin untungnya lebih mahal, maka dijual ke pihak lain dengan harga normal.

"Jadi pupuk ini malah buat perkebunan dan juga tambak karena yang mereka gunakan itu bukan subsidi. Karena beda selisih harga, ini jadi menggiurkan bagi distributor dan pengecer tapi kan harusnya pemerintah bisa lebih tegas karena ini kan gunakan subsidi yang sangat besar," jelas dia.

Akibat kelakuan para distributor dan pengecer pupuk ini, banyak petani menjerit karena terjadi kelangkaan pupuk. Dia berjanji akan menindaklanjuti jeritan petani ini ke mitra kerja terkait.

"Ini kami akan minta penjelasan kepada Menteri Pertanian dan dan PT Pupuk karena Bone dan Wajo ini jangan sampai menjadi masalah terus-menerus," tegasnya.



Pemerintah harus Tegak soal Pemberantasan *Ilegal Fishing*

Pemberantasan IUU fishing juga harus dilihat dalam sebuah perspektif yang jauh lebih luas, bukan saja terkait dengan pelanggaran hak kedaulatan atau sekadar masalah manajemen perikanan.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (12/01) – Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) semakin menarik perhatian masyarakat Internasional dan negara-negara yang memiliki pantai di seluruh dunia untuk memperkuat upaya dalam penanganan aktifitas IUU fishing sebagai sebuah masalah prioritas karena dampaknya yang sangat buruk terhadap pangan, ekonomi, lingkungan, dan keamanan sosial.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kasus IUU fishing merupakan salah satu permasalahan utama bagi Indonesia dan menjadi perhatian serius kementerian kelautan dan perikanan saat Susi Pudjiastuti menduduki jabatan menteri kelautan dan perikanan periode 2014 hingga 2019.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengungkapkan bahwa menurut ASEAN news tahun 2017, perkiraan kerugian total tahunan Indonesia dari aktivitas IUU Fishing mencapai USD 20 M.

"Kerugian tersebut termasuk risiko kerusakan permanen, pada ekosistem terumbu karang, yang kemungkinan mencapai 65% dari total luasan karang", ungkap Johan.

Anggota legislated asal NTB ini menambahkan bahwa pemberantasan IUU fishing juga harus dilihat dalam sebuah perspektif yang jauh lebih luas, bukan saja terkait dengan pelanggaran hak kedaulatan atau sekadar masalah manajemen perikanan.

"Kondisi ini sejalan dengan

kejahatan perikanan bahkan masuk dalam kategori kejahatan trans-nasional terorganisasi (transnational organized crime), sehingga pemberantasannya juga harus dipandang dari berbagai macam perspektif", papar Johan.

Pernyataan ini, kata Johan bukan tanpa alasan, jika melihat data yang dipublikasikan oleh satgas 115 kejahatan IUU fishing itu dapat dibarengi atau ditumpangai kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, human trafficking, perdagangan senjata bahkan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar.

"Pada 7 februari tahun 2018 pemerintah telah berhasil menggagalkan penyelundupan 1,37 Ton narkotika di perairan Batam, Riau yang menggunakan kapal perikanan Sunrise Glory berbendera Singapura, kemudian kejadian lain yakni terbongkarnya kasus perbudakan nelayan (Slavery) di kawasan benjina laut Aru dan Ambon pada tahun 2015, yang kian menguatkan kejahatan IUU Fishing tidak boleh lagi dianggap sebagai kejahatan perikanan biasa", tegas Johan.

Oleh sebab itu Johan meminta pemerintah untuk



tegas terhadap pemberantasan aktivitas IUU Fishing di seluruh wilayah Indonesia.

"Selain itu saya juga merinci lebih detil cara mengatasi masalah tersebut, yang tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah atau instansi tertentu saja, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk membuat sebuah sistem perlindungan utamanya di wilayah terpencil, terluar dan terdapan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengembangkan ekonomi di daerah tersebut," tandas Johan.

Sebagai contoh di Natuna, menurut Johan, keberadaan Sentra Kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Selat Lampa harus terus dioptimalkan karena selama ini kapal-kapal nelayan penangkap ikan masih sedikit yang mendaratkan ikannya di SKPT tersebut padahal dari segi fasilitas SKPT natuna sudah sangat memadai.

"Selanjutnya pemerintah melalui KKP perlu memudahkan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)," tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah harus Tegas soal Pemberantasan Illegal Fishing

Pemberantasan IUU fishing juga harus dilihat dalam sebuah perspektif yang jauh lebih luas, bukan saja terkait dengan pelanggaran hak kedaulatan atau sekadar masalah manajemen perikanan.

H. Johan Rosihan, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Surel Bocor

Ahmad Syaiku: Pemerintah Harus Dukung Gugatan Keluarga Korban Lion Air Kepada Boeing

Ini jelas jadi bukti baru dan semakin menguatkan alasan agar pemerintah secara optimal mendukung keluarga korban menggugat Boeing dan FAA,"

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (14/01) — Bocornya Surat Elektronik (surel) pegawai Boeing ke publik mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari F-PKS Ahmad Syaiku.

Menurutnya, dengan bukti ini, pemerintah harus secara optimal mendukung keluarga korban Lion Air JT 610 menggugat Boeing dan FAA (Otoritas Penerbangan AS).

"Ini jelas jadi bukti baru dan semakin menguatkan alasan agar pemerintah secara optimal mendukung keluarga korban menggugat Boeing dan FAA," ujar Syaiku.

Bagi Syaiku yang duduk di Komisi V Itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, wajib menjadikan peristiwa tersebut sebagai bekal untuk membela kepentingan WNI.

perlu dilakukan oleh pemerintah terkait fakta mengejutkan tersebut.

"Pertama, Pemerintah meminta pihak Amerika untuk investigasi secara lebih mendalam terkait isi surel tersebut, agar menjadi dasar hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Boeing dan memungkinkan FAA lalai dalam proses pemeriksaan," ungkapnya.

Kedua, lanjut Syaiku yakni mendorong pemerintah untuk tetap tidak mengizinkan operasi pesawat Boeing 737 Max di wilayah udara Indonesia hingga selesai solusi atas desain pesawat, kelengkapan sertifikasi dan panduan (sesuai rekomendasi KNKT)

Ketiga, Pihak Indonesia siap menjadi bagian dalam investigasi karena salah satu korban terbesar akibat kelalaian pihak Boeing.

"Ini harus jadi momentum. Pemerintah segera bergerak cepat melakukan tindakan-tindakan di atas," pungkas Syaiku yang sudah bertemu dengan keluarga korban Lion Air JT 610 di Perairan Karawang pada November lalu.

Foto : dpr.go.id



DPR Ingatkan Jiwasyraya untuk Bayar Kewajiban Nasabah Pemegang Polis

Saya secara pribadi menyarankan kepada pemerintah agar ada fokus penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan. Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan di terapkan untuk menyelesaikan kasus jiwasyraya ini

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (15/01) — Anggota DPR RI, Nevi Zuairina kembali meminta Kementerian BUMN agar mendorong Jiwasyraya segera membayar kewajibannya kepada nasabah pemegang polis.

Menurut Nevi hal tersebut harus dilakukan Karena upaya penyelesaian kewajiban pembayaran kewajiban polis ini merupakan masalah hati nurani bangsa, bahwa negara kita turut hadir dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang disebabkan institusi di lingkungannya.

Pada awal pembahasan

kasus Jiwasyraya yang dibawa ke DPR, pada 5 Desember 2019 lalu, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyampaikan laporan dari berbagai analisa yang ia dapat pada forum Rapat Dengar Pendapat Umum bahwa investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar ini bisa menimbulkan potensi gelembung (bubble). Bahkan catatan BPK pun menyatakan hal yang sama.

Harga saham beberapa perusahaan akan melonjak terus walaupun keuangan perusahaan ini tidak begitu baik kondisi yang berpotensi

merugikan Jiwasyraya.

"Kasus Jiwasyraya ini semakin hari kok semakin memanas saja. Bila pemerintah dengan cepat menangani kasus ini, tentunya tidak akan serumit ini penanganannya. Secara logika, bila dijalankan dengan tepat, Jiwasyraya ini mestinya tidak sampai rugi. Saya secara pribadi menyarankan kepada pemerintah agar ada fokus penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan. Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan di terapkan untuk menyelesaikan kasus jiwasyraya ini", ucap nevi dalam agenda penandatanganan usulan pansus Jiwasyraya oleh Fraksi PKS, Rabu, (15/01/2020).

Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dari catatan rapat-rapat DPR, antara Komisi VI DPR dengan Asuransi Jiwasyraya, pada Selasa 23 Juli 2019, dibahas soal tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis. Dengan nilai bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp



96,58 miliar, Jiwasyraya berkomitmen melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020.

"Saya kembali meminta, agar kasus ini tidak semakin membesar, Jiwasyraya segera menunaikan kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah pemerintah perlu segera

membentuk lembaga penjamin polis, agar kasus gagal bayar polis asuransi tidak terulang kembali, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian", tutup nevi Zuairina.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi Gas 3 kg

PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu kita minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg. Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI



Saadiah Minta SKK Migas Perjelas Offtaker Gas Blok Masela

berbagai faktor penyebab kegagalan produksi migas harus diantisipasi dan diatasi dengan baik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya lifting migas ini adalah terjadinya kebocoran pipa di beberapa lapangan produksi, diantaranya di Blok Cepu yang menyebabkan hilangnya potensi lifting minyak sebesar 2,9 ribu BOPD.

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku

Jakarta (17/01) -- Anggota Komisi VII DPR RI meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memperjelas perkembangan oftaker atau pembeli gas yang nantinya akan diproduksi oleh Blok Abadi Masela Provinsi Maluku. Penegegasan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII, Saadiah Uluputty dalam rapat yang dilakukan bersama Kepala SKK Migas pada Kamis hari ini (16/01) di Kompleks Senayan Jakarta.

Hingga saat ini sebut Saadiah, pemerintah lewat SKK Migas belum mengumumkan secara terbuka oftaker Gas dari Blok Abadi Masela. Saadiah menandakan jika kejelasan oftaker ini penting karena kegagalan penyerapan hasil produksi gas akan berdampak negatif.

"Jangan sampai ketika lapangan sudah siap berproduksi, pembeli belum siap menyerapnya. Ini akan menghalangi pencapaian target

lifting nasional", tandasnya.

Target produksi atau lifting minyak dan gas bumi disorot oleh Aleg PKS ini karena review atas capaian lifting migas nasional tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di APBN.

Saadiah mencontohkan, laporan kinerja SKK Migas terkhusus lifting Migas nasional pada APBN 2019 ditarget sebesar 775 ribu barel per hari (BOPD).

"Faktanya, hingga Desember 2019, hanya mampu tercapai 746 ribu BOPD atau 96,3%", jelas Saadiah.

Hal serupa juga terjadi pada lifting gas yang ditargetkan 7.000 MMSCFD, hanya mampu tercapai 5.926 MMSCFD atau hanya 84,8%.

"Jika ditotal, target lifting minyak dan gas bumi hanya tercapai sebesar 90,5 % dari target APBN 2019", sebut Aleg Dapil Provinsi Maluku ini.

Saadiah menyebut, review atas capaian lifting migas beberapa tahun belakangan, trennya semakin seret.

"Produksi migas Indonesia semakin tidak menggembira-



kan. Realisasi lifting migas tahun 2017 mencapai 98,9% dari target APBN 2017. Di tahun 2018 hanya 96 persen. Data kinerja lifting 2019 jarak semakin melemah, hanya 90,5% dari target APBN 2019', detail Saadiah.

Dirinya meminta agar SKK Migas lebih serius menjaga lifting migas Indonesia.

"SKK Migas harus beri perhatian serius. Penurunan produksi migas ini memprihatinkan", imbuh Saadiah.

Saadiah melanjutkan, berbagai faktor penyebab kegagalan produksi migas harus diantisipasi dan diatasi dengan baik. Salah satu faktor

utama yang menyebabkan tidak tercapainya lifting migas ini adalah terjadinya kebocoran pipa di beberapa lapangan produksi, diantaranya di Blok Cepu yang menyebabkan hilangnya potensi lifting minyak sebesar 2,9 ribu BOPD.

Selain itu, terjadi kebocoran pipa gas di Blok Southeast Sumatera (SES) yang dikelola oleh PT.Pertamina Hulu Energi SES yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Cilegon sebsar 56 BBTUD.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi Gas 3 kg

Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Jakarta (15/01) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto minta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), berhati-hati membuat rencana menarik subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020.

Sebelum menetapkan kebijakan ini Pemerintah diminta menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 kg tersebut.

"Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat," kata Mulyanto.

PKS pada dasarnya

memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.

PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu kita minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESMD menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.

"Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran," ujar Mulyanto.

Sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan

Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada "orang yang membutuhkan" dengan data by name by address yang akurat.

Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.

"Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas.

Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi," tegas Mulyanto.



Evaluasi Bencana

PKS: Integrasikan Solusi antar Kementerian dan Lembaga

Kita akan dorong segera selesainya revisi UU Kebencanaan yang juga telah menjadi prolegnas prioritas tahun ini. Kita minta pemerintah peduli dan sinergi mencari solusi yang integratif dan komprehensif antar kementerian juga pihak-pihak terkait. Jangan ada lagi obral perizinan pengelolaan lahan hijau, jangan ada lagi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, ini fatal!"

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (16/01) — Dalam rapat kerja bersama Mensos dan Kepala BNPB terkait evaluasi penanggulangan bencana di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/01/2020), DPR meminta Kemensos dan BNPB meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergitas dengan seluruh pihak termasuk relawan dilapangan untukantisipasi kemungkinan bencana yang masih berlanjut.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, diawal tanggapannya memberikan apresiasi atas langkah kement-

sos dan BNPB yang cukup sigap, tanggap dan cepat dalam pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan musibah bencana terutama banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Apresiasi juga diberikannya kepada para relawan, kepanduan dan warga yang sigap mengevakuasi dan membuat posko-posko bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana", ungkap Nurhasan.

Terkait paparan BNPB tentang evaluasi bencana yang terjadi dan potensi ancaman

kedepannya bagi Indonesia, Nurhasan menanggapi kejadian banjir diawal tahun kemarin menjadi teguran sekaligus ancaman bagi bangsa.

"Paparan BNPB tentang gundulnya hutan didaerah hulu, longsor tanah seperti timah yang mencair, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, dan lain-lain menjadi penyebab yang akan mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi bagi bangsa ini," pungkasnya.

Menurut Nurhasan persoalan kompleks dan komprehensif penyebab bencana menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, hal ini salah satunya terkait koordinasi dan integrasi solusi lintas kementerian yang dianggapnya bermasalah.

"Persoalan bencana bagi Indonesia bukan main-main. Selain tawakal kita pada Allah atas musibah yang terjadi, ikhtiar harus juga diupayakan secara optimal," paparnya.

Oleh sebab itu Negara harus hadir, karena barang mahal kita saat ini adalah mengintegrasikan solusi yang komprehensif antar kementerian dan lembaga negara, ini menjadi catatan penting buat



pemerintah.

"Untuk itu kita akan dorong segera selesainya revisi UU Kebencanaan yang juga telah menjadi prolegnas prioritas tahun ini. Kita minta pemerintah peduli dan sinergi mencari solusi yang integratif dan komprehensif antar kementerian juga pihak-pihak terkait. Jangan ada lagi obral perizinan pengelolaan lahan hijau, jangan ada lagi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, ini fatal", tegasnya.

Dan kedepan, kata Nurhasan dalam penanganan bencana oleh BNPB dan kemensos dilapangan, kami minta perkuat koordinasi

dengan Anggota-anggota dewan di daerah bencana tersebut.

"Hal ini untuk mensinergiskan kerja dan kinerja kita dalam penanganan bencana, termasuk bagaimana relawan-relawan kita dilapangan yang sejak detik-detik awal membantu masyarakat terdampak sebelum negara hadir dapat teroptimalisasi, tersinergi dan disupport oleh pemerintah, karena disanalah esensi masyarakat tanggap bencana yang saling gotong royong dan saling ta'awun dapat terasa dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat terdampak," tutup Nurhasan.

Gekanas ke Fraksi PKS,

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jangan Rugikan Pekerja

“Para pekerja sebagaimana disampaikan Gekanas, berharap RUU Cipta Lapangan Kerja tidak memasukan klaster tenaga kerja dalam pembahasannya. Mereka khawatir, jika diundangkan, RUU ini menjadi sangat merugikan bagi kaum pekerja

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/01) — Kalangan pekerja menilai ada sinyal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) justru memperlemah kedudukan pekerja. Mereka khawatir, RUU ini justru membuat kalangan pekerja tertimpa celaka.

Demikian terungkap dalam audiensi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) dengan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pada Hari Aspirasi, Selasa (14/1/2020) di ruang Rapat Pleno Fraksi PKS. Gekanas terdiri atas serikat pekerja, LBH, akademisi dan peneliti, dipimpin oleh Arif

Minardi dan Indra M.

“Para pekerja sebagaimana disampaikan Gekanas, berharap RUU Cipta Lapangan Kerja tidak memasukan klaster tenaga kerja dalam pembahasannya. Mereka khawatir, jika diundangkan, RUU ini menjadi sangat merugikan bagi kaum pekerja,” ungkap Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS yang menerima audiensi Gekanas bersama Netty Prasetyani dan Alifuddin.

Arif Minardi mengungkapkan, audiensi pada hari Selasa yang merupakan hari aspirasi Fraksi PKS DPR RI

ini dilakukan sebagai sarana menyampaikan usulan dan harapan dari aliansi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Gekanas tersebut sehubungan rencana penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam pandangan pekerja, jelas Arif, Omnibus Law ini mengandungan banyak kelemahan.

“Teman-teman Pekerja menyampaikan harapannya, jika RUU ini tetap dibahas dan akan disahkan, maka jangan sampai ada degradasi hak-hak pekerja yang menyebabkan kondisi kesejahteraan pekerja menurun. Sampai saat ini, komisi IX dan Fraksi PKS belum menerima draft resmi dari pemerintah tentang RUU ini, kita masih menunggu,” Mufida menjelaskan.

Gekanas dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, beredat info bahwa pengaturan yang terdapat di RUU ini malah memperlemah kedudukan pekerja. Di antaranya munculnya usulan penggajian berbasis jam, penghilangan pesangon dan belum lagi pengaturan upah minimum



yang dihilangkan.

“Karena itu, para pekerja berharap, RUU Cipta Lapangan Kerja ini tidak memasukan klaster tenaga kerja dalam pembahasannya. Jangan sampai UU ini menjadi UU

Cilaka bagi pekerja. Kami berharap Fraksi PKS menolak RUU ini, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,” tegas Indra, menutup penyampaiannya.



Khawatir Omnibus Law, Gerkanas Titip Aspirasi ke Fraksi PKS

Jakarta (15/01) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI berinisiatif untuk mengadakan pertemuan yang membahas tentang rencana akan diundangkannya Omnibuslaw. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Pleno F-PKS DPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut atas permohonan dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) untuk mempertimbangkan kembali konsep penerapan Omnibuslaw di Indonesia.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Fraksi PKS tersebut mencoba membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terutama tentang rancangan diundangkannya Omnibuslaw terkait klaster ketenagakerjaan.

Rombongan diterima Perwakilan Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Alifudin anggota DPR RI komisi IX yang turut memimpin jalannya pertemuan mengatakan adanya kekhawatiran dari Gerkanas dengan akan diundangkannya

Omnibus Law.

"Kami baru saja menerima tamu dari Gerkanas, Serikat Pekerja, buruh dan lain lain, kehadiran kawan kawan dalam rangka menyampaikan aspirasi di antaranya tentang akan diundangkannya Omnibus Law, mereka khawatir karena pemerintah lebih mendegarkan dari pihak pengusaha, sementara dari pekerja tidak diajak berdialog sehingga ditakutkan Undang-undang Omnibus Law Lebih berpihak ke pengusaha," ujar Alifudin, anggota DPR RI dari Kalbar I.

Ya dari diskusi dengan kawan-kawan Gerkanas, kami dapat masukan, pertimbangan dari mereka, dan Insya Allah akan kami teruskan aspirasinya ke kawan-kawan komisi IX DPR RI, agar undang-undang Omnibus Law yang nantinya akan dibahas bersama Menaker, bisa berpihak ke pekerja, intinya harus adil

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M.

Anggota Komisi IX DPR RI

Alifudin juga mengatakan akan meneruskan dan terus mengawal Undang-undang Omnibus Law yang akan berdampak kepada tenaga kerja.

"Ya dari diskusi dengan kawan-kawan Gerkanas, kami dapat masukan, pertimbangan dari mereka, dan Insya Allah akan kami teruskan aspirasinya ke kawan-kawan komisi IX DPR RI, agar undang-undang Omnibus Law yang nantinya akan dibahas bersama Menaker, bisa berpihak ke pekerja, intinya harus adil," tambahnya.

Feri satu di antara perwakilan Gerkanas mengatakan secara konsep Omnibus law tidak menjadi perdebatan secara keseluruhan, hanya saja ada hal yang menjadi urgensi untuk melakukan pertimbangan

kembali.

"Hal-hal tersebut yaitu isi dari UU yang dulu pasalnya mau direvisi di UU 13, adanya penolakan keras pada DPR sejak 2006 saat ingin merevisi pasal-pasal terkait pengupahan, pesangon, prosedur PHK, hubungan kerja," ujarnya.

Feri juga mengatakan selama ini masukan kepada Presiden tentang Omnibuslaw hanya dari sepihak saja yakni pengusaha yang ingin mengubah pasal dan buruh yang dianggap tidak akan menolak.

"Harapan kami dengan adanya pertemuan bersama komisi IX DPR RI dari fraksi PKS bisa mengawal rancangan undang-undang terkait omnibus law, dan kami berterimakasih dengan adanya pertemuan ini," tambahnya.





Koordinasi dengan Poksi IX pasca Penandatanganan Hak interpelasi BPJS

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA melakukan koordinasi di ruangannya dengan Anggota Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS pasca penandatanganan bersama seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI terkait hak interpelasi BPJS pada Rabu (15/1).

BPJS KESEHATAN INGKAR JANJI BERBUAH INTERPELASI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan tetap naik. Bahkan, jutaan peserta PBI tercoret dari daftar sehingga tidak dapat mengakses layanan. Bagaimana kami bisa berdiam diri,”

Dr.Hj Netty Prasetiyani MSi
Anggota Komisi IX FPKS DPR RI



1 2 SEPTEMBER 2019

Rapat Gabungan Komisi IX dan XI dengan Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dirut BPJS Kesehatan. Menolak rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan kelas III Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).



2 24 OKTOBER 2019

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini berisi kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan semua kelas per 1 Januari 2020

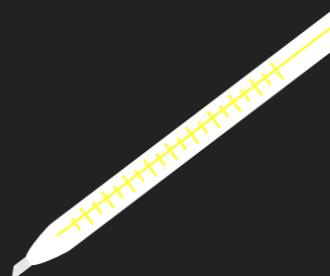


3 6 - 7 NOVEMBER 2019

Komisi IX DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur BPJS Kesehatan. Mendesak Kemenkes untuk mencari subsidi (pembiayaan) bagi selisih kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III Mandiri PBPU dan BP.

4 12 NOVEMBER 2019

FGD Fraksi PKS DPR RI dengan tema "Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia"



5 2 DESEMBER 2019

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia.

6 9-10 DESEMBER 2019

Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, membahas evaluasi program dan permasalahan kesehatan aktual.



7 11 DESEMBER 2019

RDP Komisi IX dengan Dirjen Yankes Kemenkes dan Direktur RS vertikal. Mendengarkan penjelasan tentang kesiapan fasilitas layanan kesehatan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan

8 12 DESEMBER 2019

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan ditemukan kesepakatan yang bisa digunakan sebagai solusi agar tidak terjadi kenaikan iuran bagi peserta mandiri kelas 3 dengan cara pemerintah membayarkan selisih kenaikan premi kelas 3 kelompok PBPU dan BP menggunakan dana surplus Dana Jaminan Sosial (DJS). Dan Kementerian kesehatan dan BPJS Kesehatan menjamin per 1 Januari 2020 dapat diimplementasikan.



9 1 JANUARI 2020

Pemerintah dan BPJS Kesehatan mengingkari kesimpulan dan kesepakatan rapat 12 Desember 2019 dengan Komisi IX DPR RI dan tetap melaksanakan Perpres 75/2019 yang mengamankan kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan.

10 15 JANUARI 2020

Menyadari bahwa BPJS adalah amanat Undang-Undang dan kesehatan adalah hak warga negara yang dilindungi oleh UUD NRI 1945, Fraksi PKS menandatangani usulan hak interpelasi anggota DPR RI atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III Mandiri PBPU dan BP.



Gandeng Perusahaan Pengemplantax Pajak Netflix, DPR: Mendikbud Kebablasan

kenapa program seperti festival film pendek yang digagas bersama Netflix tersebut tidak bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang memang menjadi domain kementerian baru itu. Bekraf (sekarang Parekraf) sebelumnya kan sudah menggelar ratusan festival film di Indonesia selama lima tahun terakhir

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (14/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengkritik langkah Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang menggandeng kanal berbayar Netflix dalam menyelenggarakan festival film bertema Pancasila.

"Idenya oke, tapi lihat siapa yang digandeng, malah jadi kontraproduktif disaat Netflix sedang jadi tersangka," ujar Fikri di Senayan, Senin (13/1).

Menurut Fikri, bila niatnya baik, tapi caranya salah hanya akan membuat kekacauan

koordinasi antar instansi & kementerian di bawah presiden Jokowi.

"Menteri yang lain lagi ngejar ngejar pajaknya, yang satu malah melindungi dan ajak bermitra, kan cacau," imbuh politisi PKS ini.

Dirinya meminta Mendikbud mengkaji ulang kerjasama tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi penagakan hukum di Indonesia.

"Netflix harus selesaikan kewajibannya lebih dulu sesuai perundangan yang berlaku, termasuk kewajiban terkait investasi badan hukum dan

pajak," tegas Fikri.

Selain itu, Fikri juga mempertanyakan kenapa program seperti festival film pendek yang digagas bersama Netflix tersebut tidak bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang memang menjadi domain kementerian baru itu.

"Bekraf (sekarang Parekraf) sebelumnya kan sudah menggelar ratusan festival film di Indonesia selama lima tahun terakhir," imbuh dia.

Lebih jauh, Fikri mengutarakan soal pendekatan Mendikbud menggandeng kanal asing seperti Netflix yang berisikan film lintas genre, termasuk film dewasa yang tanpa sensor.

"Sebagai instansi yang mengemban citra pendidikan, rasanya mendikbud kebablasan," cetus Fikri.

Netflix merupakan perusahaan digital streaming yang berbasis di Kalifornia, Amerika Serikat. Mengutip data Statistik, Netflix memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia hingga 2019.

Pelanggannya bahkan diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 906.800. Tetapi sangat



disayangkan Netflix ternyata tidak membayar pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kominfo mengaukan akan mengejar hal itu sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Ada tiga paket yang ditawarkan Netflix untuk para pelanggan di Indonesia. Mereka bebas memilih dengan membayar Rp 109.000/bulan, Rp 139.000/bulan, atau Rp 169.000/bulan. setidaknya

Netflix pasti akan meraup Rp 52,48 miliar per bulannya.

Artinya, selama setahun perusahaan tersebut minimal meraih Rp 629,74 miliar, bahkan angka tersebut bisa bertambah karena ada paket standar dan premium. Karena hal itu negara berpotensi dirugikan minimal Rp. 62,9 miliar, itupun hanya dari potensi ppn yang hilang

Foto : dpr.go.id

Saat Reses, Sakinah Siap Bantu Perjuangkan Pendidik Non Formal di Dapilnya

kita memang sayangkan kenapa harus dirubah kebijakan yang lama dan sebenarnya sudah berjalan cukup bagus. Saya akan sampaikan masalah ini saat rapat nanti. Kami akan bantu perjuangkan bagaimana pendidikan non formal itu tetap eksis

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Komisi X DPR RI Dapi Sulawesi Tengah

Palu (13/01) — Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghilangkan pendidikan non formal (PNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sakinah mengaku siap membantu memperjuangkan agar direktorat pendidikan masyarakat yang selama ini menaungi pendidikan non formal tetap ada, sebagaimana disampaikan saat menerima pengurus Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan

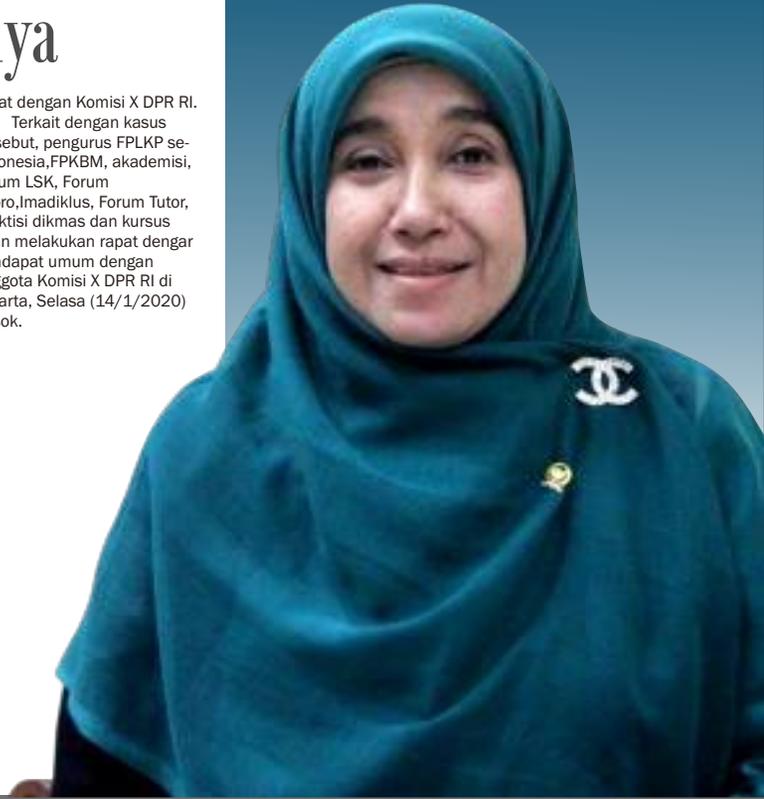
(FPLKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (10/1/2020).

“Yah kita memang sayangkan kenapa harus dirubah kebijakan yang lama dan sebenarnya sudah berjalan cukup bagus. Saya akan sampaikan masalah ini saat rapat nanti. Kami akan bantu perjuangkan bagaimana pendidikan non formal itu tetap eksis,” tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut dengan partainya sebelum diteruskan dalam

rapat dengan Komisi X DPR RI.

Terkait dengan kasus tersebut, pengurus FPLKP se-Indonesia, FPKBM, akademisi, Forum LSK, Forum Aspro, Imadiklus, Forum Tutor, praktisi dikmas dan kursus akan melakukan rapat dengar pendapat umum dengan anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (14/1/2020) besok.



Pansus Jiwasraya Mutlak, BPK dan Kejagung Temukan Kerugian Negara

Apabila kasus seperti Jiwasraya ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan khusus bukan tidak mungkin akan membuka peluang bagi kasus-kasus serupa yang dapat terjadi di kemudian hari. Bukan hanya itu, rakyat berhak mendapatkan kejelasan kasus ini dan perlu melihat bagaimana keseriusan wakil-wakil mereka di DPR

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (12/01) --- Anggota DPR RI Anis Byarwati menegaskan sikapnya agar rekan-rekannya di DPR segera membentuk Pansus Kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp. 13,7 Triliun.

Menurut Anis, Pansus itu bukti keseriusan DPR agar kasus ini bisa diungkap dengan jelas dan gamblang, siapa saja dalang di balik kerugian negara yang bernilai Triliunan tersebut.

"Kita harapkan dengan

pansus yang dibentuk DPR, segera ada solusi untuk pengembalian dana nasabah", ungkap Anis.

Anis menambahkan Jika pada kasus Bank Century sebelumnya DPR membentuk Pansus Century, maka sudah selayaknya dengan potensi kerugian negara yang jauh lebih besar, DPR pun harus segera membentuk Pansus Jiwasraya.

"Apabila kasus seperti Jiwasraya ini dibiarkan begitu

saja tanpa ada penanganan khusus bukan tidak mungkin akan membuka peluang bagi kasus-kasus serupa yang dapat terjadi di kemudian hari. Bukan hanya itu, rakyat berhak mendapatkan kejelasan kasus ini dan perlu melihat bagaimana keseriusan wakil-wakil mereka di DPR", tegas Anis.

Anis melanjutkan kasus Jiwasraya ini tak cukup hanya dengan pembentukan Panja saja, mengingat begitu kompleksnya kasus ini, dan perlu pembahasan lintas komisi.

"Spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan serta pasar modal, menjadi alasan kuat segera dibentuk Pansus yang terdiri dari Komisi XI yang membidangi sektor keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait Penegakan Hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)", tutur Anis.

Sebelumnya, kata Anis, perlu diketahui juga bahwa Kejaksaan Agung menyatakan PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019

menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

"Begitu juga dengan BPK, yang telah mengungkap bahwa ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksa dana pada 2018. Bahkan BPK mengindikasikan potensi kerugian negara berikutnya bisa jauh lebih besar lagi", papar Anis.

Direksi Jiwasraya yang baru, kata Anis, sebelumnya menyatakan dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Jiwasraya (dengan nilai RBC 120 persen) mencapai Rp32,68 triliun. Hal ini tentu perlu akuntabilitas yang tinggi termasuk arah penyetahan yang disiapkan oleh Pemerintah.

"Masalahnya bukan Cepat atau Lambat. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani kejagung dan BPK serta sudah dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang sudah diumumkan, tinggal perlu pen

gusutan dan audit investigasi secara tuntas terhadap fraud yg terjadi", punga Anis.

Anis menegaskan hingga detik ini, PKS mendukung secara penuh dibentuknya Pansus Jiwasraya dan pasti akan terus mengawal kasus ini di Kejagung.

"Kami tidak akan memberi celah kepada aktor intelektual untuk memanfaatkan atau berlindung di balik kekuatan Pansus", tegas Anis.

foto : dpr.go.id



Rupiah Menguat, Bukan Karena Faktor Fundamental

Faktor fundamental yang dimaksud lebih pada kinerja ekspor maupun realisasi penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) serta kinerja pariwisata. Komponen-komponen tersebut menjadi pemasok valas ke domestik

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jakarta (13/09) — Penguatan Rupiah terhadap Dollar AS menjadi berita baik di awal tahun 2020. Rupiah menguat dan mendekati level Rp13.500 per US\$.

Realisasi tersebut sudah jauh di atas target APBN-2020 sebesar Rp14.400 per US\$. Akan tetapi, faktor penguatan Rupiah tersebut bukan bersumber dari perbaikan fundamental ekonomi Indonesia. Jadi, potensi depresiasi masih sangat tinggi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menjelaskan bahwa Rupiah menguat karena global yang memanas. Salah satu faktornya adalah penurunan ekonomi AS, sehingga

mendorong aliran modal masuk ke ekonomi Indonesia. AS diprediksi semakin mendekati krisis sehingga pemilik modal mengalihkan portofolionya ke negara-negara ber-yield tinggi termasuk Indonesia. Pertumbuhan AS dan China juga semakin melambat serta munculnya konflik AS dan Iran.

"Jadi, jangan bangga dulu kalau Rupiah menguat. Kita harus lihat faktor pendorongnya", kata Ecky di Senayan, Jakarta (13/1/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan seharusnya penguatan rupiah berasal dari faktor fundamental, ini kan tidak.

"Faktor fundamental yang dimaksud lebih pada kinerja

ekspor maupun realisasi penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) serta kinerja pariwisata. Komponen-komponen tersebut menjadi pemasok valas ke domestik", ungkap Ecky.

Data BPS kata Ecky, menunjukkan neraca perdagangan masih defisit cukup tinggi. Tanda-tanda lonjakan ekspor pun belum terlihat hingga akhir tahun. Sementara itu realisasi wisatawan mancanera negara gagal dicapai.

"Jadi, tidak ada yang istimewa dari penguatan nilai tukar, jika ekspor, FDI dan pariwisata masih melambat," ujar Ecky.



Junaidi Auly: Lima Alasan PKS Mendesak Pansus Jiwasraya

Perlu penanganan lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan. Jika tidak, maka hal ini dapat memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional

Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (13/01) — Kasus Jiwasraya terus bergulir dan pada gilirannya publik menilai begitu urgensi pembentukan pansus.

Anggota Legislatif dari Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan pembentukan Pansus Jiwasraya penting, agar kasus tersebut jelas, transparan dan diselesaikan lebih cepat.

"Perlu penanganan lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan. Jika tidak, maka hal ini dapat memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional," ungkap Junaidi.

Junaidi menekankan

bahwa terdapat 5 (lima) dasar kenapa Fraksi PKS mendesak pansus Jiwasraya.

"Fraksi PKS sangat fokus pada kasus ini karena ada potensi kerugian hingga masalah keadilan bagi nasabah. Misalnya poin pertama adalah potensi kerugian negara yang sangat besar yaitu mencapai Rp. 13,7 triliun. Angka itu jauh lebih dari dua kali nilai kasus Bank Century sebesar Rp. 6,7 triliun", tegasnya.

Poin yang kedua kata Junaidi, adalah dugaan masalah kejahatan terorganisir, Jiwasraya dirusak cukup parah dari dalam, sehingga baru diketahui setelah asetnya

membusuk.

"Poin ketiga yaitu terkait dengan dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Dugaan manipulasi laporan keuangan misalnya terlihat pada pengaturan pos cadangan premi, revaluasi properti dan nilai asset lainnya sebagai cerminan kecurangan terorganisasi," jelas Junaidi.

Poin ke empat kata Junaidi, dugaan adanya kelemahan pengawasan dari otoritas OJK dan Kementerian BUMN.

"OJK diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan non bank sedangkan Kementerian BUMN menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan pejabat", pungkasnya.

Poin terakhir lanjut Junaidi, yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah bagaimana penyelesaian kasus Jiwasraya agar memberikan kepastian bagi 5,2 juta nasabah dan tidak merugikan mereka.



DPR RI Perkuat Kemitraan Parlemen Asia-Pasifik melalui APPF

Seluruh delegasi akan membahas berbagai isu dalam sesi politik dan keamanan, sesi kerjasama regional dan juga sesi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik juga akan dibahas isu-isu kesetaraan gender dalam ekonomi dalam kerangka Women Parliamentarians Meeting

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota BKSAP DPR RI

Jakarta (15/01) — DPR RI memperkuat Kemitraan Parlemen Asia-Pasifik melalui APPF, Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis turut menjadi delegasi DPR RI menghadiri pertemuan tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang sedang dilaksanakan di Canberra, Australia.

Pertemuan tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dilaksanakan di Canberra, Australia pada 13-16 Januari 2020.

Sebagai forum parlemen regional, APPF merupakan mekanisme dialog untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di kawasan dan turut

mendukung hubungan luar negeri antar negara-negara Asia-Pasifik melalui diplomasi parlemen.

Forum kerja sama antar parlemen ini berperan dalam mengambil keputusan strategis bagi kawasan untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan di masing-masing parlemen negaranya.

Dalam persidangan, Iskan menyampaikan bahwa seluruh delegasi akan membahas berbagai isu dalam sesi politik dan keamanan, sesi kerjasama regional dan juga sesi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

"Secara spesifik juga akan dibahas isu-isu kesetaraan

gender dalam ekonomi dalam kerangka Women Parliamentarians Meeting", tutur Iskan

Perlu diketahui, lanjut Iskan, mekanisme khusus yang secara spesifik mendalami isu-isu perempuan ini merupakan inisiatif DPR RI periode terdahulu dan telah diakui secara resmi dalam Rules of Procedure APPF.

"Di sesi politik dan keamanan, negara-negara anggota APPF membahas sejumlah topik yang relevan dengan perdamaian dan stabilitas kawasan termasuk di dalamnya mengenai deradikalisasi", ungkap Iskan.

Sesi plenary kedua dari APPF, kata Iskan, didedikasikan untuk membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, termasuk isu kekinian digital ekonomi dan konektivitas kawasan.

"Sesi ketiga didedikasikan untuk membahas kerjasama regional dalam bidang perubahan iklim, pariwisata dan pembangunan berkelanjutan", tutup Iskan.



Syahrul Aidi Ditunjuk Sebagai Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina

Misi utamanya adalah untuk mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara antara Indonesia dan Palestina

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A

Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina

Jakarta (17/01) — Anggota komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina. Seluruh fraksi di DPR RI masing-masing memiliki utusan yang tergabung kedalam satu grup.

Dimana mereka akan melakukan lawatan ke negara tersebut dan menggelar pertemuan focus group discussion (FGD) dengan parlemen kedua negara tersebut yang akan membahas berbagai isu.

"Misi utamanya adalah untuk mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan

kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara antara Indonesia dan Palestina," kata Syahrul Aidi di kompleks DPR RI Jakarta, Kamis (16/1).

Selain itu anggota Komisi V fraksi PKS itu menyebut, misi GKSB ini juga semacam pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama diberbagai bidang baik Palestina maupun sebaliknya.

"Peningkatan kerjasama

dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara tersebut," tambahnya.

Kunjungan GKSB DPR RI ke Palestina belum dijadwalkan, namun menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua negara.

Saat ini, total GKSB baru hanya 53 negara yang dibentuk dan sudah aktif menjalankan tugasnya dan berkunjung ke negara-negara sahabat. Namun, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berencana melebarkan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), jumlah tersebut dinilai sebagai kuantitas yang sesuai dengan negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.



Keputusan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Tepat

Pada rapat-rapat tersebut pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kelas III mandiri. Dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI menyetujui hal ini. Dengan terjadinya pengingkaran terhadap keputusan bersama maka pemerintah telah melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. DPR RI kehilangan marwah. Oleh sebab itu Fraksi PKS mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk pansus

H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyatakan bahwa Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bertindak tidak tepat, karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III mandiri (untuk orang miskin dan tidak mampu-red) per 1 Januari 2020 di tengah memburuknya ekonomi rakyat.

Ansory menegaskan,

Fraksi PKS sangat kecewa atas sikap pemerintah yang mengabaikan kesepakatan dari hasil rapat gabungan 3 komisi, yakni Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI pada tanggal 2 September 2019 lalu. Ditambah lagi 2 rapat lainnya, yaitu rapat Komisi IX pada tanggal 6 dan 7 November 2019, serta rapat tanggal 12 Desember 2019.

"Pada rapat-rapat tersebut pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kelas III mandiri. Dan seluruh

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI menyetujui hal ini. Dengan terjadinya pengingkaran terhadap keputusan bersama maka pemerintah telah melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. DPR RI kehilangan marwah. Oleh sebab itu Fraksi PKS mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk pansus," tandasnya.

Sebelumnya Ansory menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ikut berperan membangun kesejahteraan rakyat seperti yang diamanahkan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.

"Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, APBN dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 3 menegaskan, setiap orang berhak mendapat jaminan sosial. Sementara Pasal 31 UUD 1945 menyatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," terangnya. (dep/es)
Foto : dpr.go.id



Pemerintah Harus Kompensasikan Kesejahteraan Jangan Hanya Politik

"Ada kebekuan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sementara harapan kita Internal Aceh sudah membulatkan satu sikap politik demi Aceh yang lebih baik kedepan

RAFLI

Anggota DPR RI Dapil Aceh I

Jakarta (13/01) — Rapat Paripurna Ke 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada senin 13 Januari 2020, di Senayan Jakarta, membuka tahun ini dengan gagasan startegis untuk kemaslahatan Rakyat Aceh melalui Parlemen RI.

Pasalnya, Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli melalui rapat paripurna tersebut, menyampaikan gagasan absolut kepada pemerintah pusat sebagai solusi menjawab persoalan politik di Provinsi ujung barat Indonesia itu.

"Ada kebekuan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sementara

harapan kita Internal Aceh sudah membulatkan satu sikap politik demi Aceh yang lebih baik kedepan", ungkap Rafli saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna Senin, (13/01/2020).

Hari ini kata Rafli teman-teman dari mantan Gerakan Aceh Merdeka sudah duduk bersama merumuskan sebuah konsesus yang dinamis dan penting tentang persoalan politik, bila kesepakatan ini sudah ada, harapan kami sebagai Rakyat Aceh.

"Konsesus ini nantinya menjadi sebuah landasan bahwa pemerintahan pusat bukan hanya memberikan

kompensasi politik bagi Aceh seperti dana otonomi khusus dan sebagainya, melainkan bagaimana semangat Pemerintah Pusat ingin memberikan kompensasi kesejahteraan yang utuh bagi Aceh, hingga kesejahteraan Rakyat Aceh itu menjadi harkat martabat Pemerintah Pusat" Tegas Rafli

Senada itu, Rafli juga menanggapi statement Menteri Agama RI yang disinyalir menyudutkan dengan menyebut Aceh Intoleran di media massa.

"Statement Menteri Agama (Fakhurrazi) akhir-akhir ini kita lihat kurang produktif, wa bil khusus untuk Aceh yang beliau bilang Intoleran, padahal bila kita lihat lebih dalam filosofisnya, Aceh merupakan sebuah Negeri yang sangat kooperatif dan dinamis serta komunikatif. Nah, terkait ini kita harap, Jangan ada lagi bahasa seperti itu, apalagi beliau sendiri punya historis dengan Aceh, semestinya perlu pertimbangan," tutup Rafli, Politisi FPKS ini.



Reses Usai, Jazuli Tegaskan PKS Siap Kawal Amanat Rakyat

"Ada banyak masukan dan aspirasi dari publik selama kegiatan reses yang dilakukan hampir dua pekan berjalan. Utamanya terkait program yang menyangkut kebutuhan utama masyarakat seperti BPJS dan komoditas dasar. Termasuk sejumlah kasus yang saat ini ramai dibahas di ruang publik

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (13/1) Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini meyakinkan bahwa Fraksinya berkomitmen penuh mengawal berbagai aspirasi dan informasi yang berasal dari masyarakat selama melakukan kegiatan reses.

"Ada banyak masukan dan aspirasi dari publik selama kegiatan reses yang dilakukan hampir dua pekan berjalan. Utamanya terkait program yang menyangkut kebutuhan utama masyarakat seperti BPJS dan

komoditas dasar. Termasuk sejumlah kasus yang saat ini ramai dibahas di ruang publik." disampaikan oleh Jazuli Juwaini di sela-sela kegiatan reses di Serang - Banten (12/1).

Jazuli menambahkan, setiap Anggota Fraksi PKS DPR RI akan segera mengelaborasi berbagai informasi dan data yang telah dihimpun selama kegiatan reses. Untuk kemudian menjadi sikap dan pandangan resmi Fraksi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah.

"Pemerintah harus fokus

mengawal berbagai informasi yang didapat sesuai kapasitas Anggota yaitu Legislatif, legislasi, dan pengawasan." tegasnya.

Dihari terakhir reses, Jazuli menjalani beberapa kegiatan seperti Acara ceramah dan santunan yatim di yayasan ashohwah. Kemudian, ceramah di MT Alhidayah kompleks TCP dan masih banyak yang lainnya.



Akhir Masa Reses, Syahrul Aidi Kunjungi Almamater

"Ini tempat saya digembleng dan dibina. Hari ini saya kesini mengenang kisah lama. Melihat kondisi pondok terkini. Saya akan membantu pihak pengelola pondok mencari bantuan dalam perbaikan fasilitas sekolah. Mudah-mudahan tidak ada kendala

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

Bangkinang (10/01) - Usai dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober 2019, Syahrul Aidi baru dapat bersilaturahmi dengan almamater sekolahnya dahulu yaitu Pondok Pesantren Islamic Centre Al Hidayah Kampar, pada Jumat (10/1).

Kedatangan Syahrul Aidi tidak sendirian, dia mengajak Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Riau Ichwanul Ihsan. Syahrul Aidi ingin meninjau beberapa fasilitas penunjang pendidikan di almamater beliau.

Disambut pimpinan pondok, KH Muhammad Abdi

Lc MA, beserta jajaran guru dan santri, Syahrul Aidi terlihat sumringah dan bahagia. Buya Abdi, panggilan pimpinan Islamic centre, menyambut bahagia kedatangan Syahrul Aidi.

Kepada Syahrul Aidi beliau menyampaikan beberapa kondisi terkini pondok. Salah satu persoalan penting yang dialami oleh pondok saat ini adalah ketersediaan air bersih.

"Hal ini sudah lama kami keluhkan. Kita beberapa kali telah carikan solusi, tapi air bersih belum ditemukan" ujar Buya Abdi yang menyebutkan kondisi di areal pondok

memang sulit air bersih.

Kepala BPPW Riau, Ichsanul Ihsan menambahkan memang fasilitas sekolah harus diperhatikan, terutama fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK).

"Melihat kondisi MCK, sesuai arahan pak ustadz (Syahrul Aidi-red), kita akan bangun fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Fasilitas IPAL ini penting agar tak merusak kesehatan para santri dan juga lingkungan" ujar Ichwanul.

Syahrul Aidi saat meninjau menyatakan akan membantu pihak pengelola pondok sesuai kapasitas dia. Karena menurutnya, almamater dia tersebut memiliki peran penting atas karir yang dia dapatkan selama ini.

"Ini tempat saya digembleng dan dibina. Hari ini saya kesini mengenang kisah lama. Melihat kondisi pondok terkini. Saya akan membantu pihak pengelola pondok mencari bantuan dalam perbaikan fasilitas sekolah. Mudah-mudahan tidak ada kendala." ucap Syahrul Aidi.



Dimiyati Dorong Pemerintah Pusat Preventif, Tangani Bencana di Lebak

“Jangan tunggu banjir dulu dan ada korban dulu. Jika Lebak kena bencana maka Pandeglang kena imbasnya juga, begitu pula sebaliknya

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH.,MH

Anggota DPR RI Dapil Banten

Lebak (15/01) — Anggota DPR RI Dimiyati Natakusumah mendorong pemerintah pusat bertindak secara preventif dalam melakukan penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten.

Hal itu diungkapkan Dimiyati Natakusumah saat mendampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita saat menyerahkan bantuan kepada Pemda Lebak di Kantor BPBD Lebak, Senin (13/1/2020).

“Saya harap pemerintah pusat itu bertindak preventif detentional. Kalau sudah terjadi begini (bencana, red) kan mahal,” kata Dimiyati kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Maka dari itu, kata

anggota Komisi III dari fraksi PKS ini, mulai saat ini pemerintah harus bertindak bagaimana memperbaiki kerusakan yang timbul akibat bencana, seperti normalisasi sungai dangkal akibat longsor.

“Jangan tunggu banjir dulu dan ada korban dulu. Jika Lebak kena bencana maka Pandeglang kena imbasnya juga, begitu pula sebaliknya,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat dan kementerian PUPR segera membantu normalisasi sungai baik yang ada di Lebak maupun Pandeglang. Mengingat kedua daerah tersebut wilayahnya saling berdampingan.

la juga mendorong

kerjasama antara Pemkab Lebak dengan Pandeglang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun sungai, agar kedua daerah ini bisa saling menguatkan.

“Dengan sendirinya kedua daerah ini saling ketergantungan. Makanya harus ada kerjasama yang baik dari keduanya,” tukasnya

Foto :
dpr.ogo.id





BKSAP

Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)

Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis turut menjadi delegasi DPR RI menghadiri pertemuan tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang sedang dilaksanakan di Canberra, Australia.

Pertemuan tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dilaksanakan di Canberra, Australia pada 13-16 Januari 2020.

PANSUS

Fraksi PKS Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS

Jakarta (15/1) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI resmi mengulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri. Peresmian dilakukan dengan Konferensi Pers dan penandatanganan dokumen pembentukan Pansus oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR di Kantor Fraksi PKS DPR (Rabu, 15/1).

DAERAH PEMILIHAN

Bantu Korban Banjir dan Longsor di Lebak

Lebak (13/1) - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri pada hari Senin, 13 Januari 2020, mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Lebak Banten. Dalam kunjungan ini Habib Salim didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua Wilda Banjarbar Ahmad Syaikhun, Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta, Anggota DPR Fraksi PKS Dapil Banten Dimiyati Natakusumah dan Pengurus PKS lainnya.



KOMISI III

Sidak Lapas Cipinang Jakarta Timur

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy bersama Tim Komisi III DPR melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur Kamis (16/1/2020).



BAKN

Rapat dengan Badan Keuangan Provinsi Papua

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI H. Ahmad Syaikhul bersama tim BAKN DPR RI hadir pada rapat dengan Asisten III bidang Umum dan Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Rabu (15/1/2019).



KOMISI IX

RDPU dengan Serikat Pekerja

Komisi IX DPR RI RDPU dengan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketua Umum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), serta Ketua Umum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN terkait "Omnibus Law" Cipta Lapangan Kerja, Kamis, 16 Januari 2020.



Aspirasi Gerakan Kesejahteraan Nasional

Anggota Poksi IX Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, Netty Prasetyani dan Alifuddin menerima Gerakan Kesejahteraan Nasional (Serikat pekerja, Akademisi, LBH, Peneliti dll) pada Selasa 14 Januari 2020 di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI Kompleks DPR RI Senayan. Aspirasi tentang rencana diundangkannya Omnibus law terkait klaster ketenagakerjaan. Ajuan aspirasi.

Aspirasi Forum Komunikasi Penyelia Mitra Tani (FK PMTN)

Anggota Komis IV DPR Ri dari Fraksi PKS Dapil NTB H. Johan Rosihan, ST me-nerima perwakilan Forum Komunikasi Penyelia Mitra Tani (FK PMTN) yang bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Kementerian Pertanian, tepatnya di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rabu, 15 Januari 2020. Aspirasi terkait perpanjangan kontrak PMT.

Silaturahmi Pimpinan Pascasarjana Universitas Sahid

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA menerima kunjungan rektor dan pimpinan Pascasarjana Universitas Sahid di ruang rapat pimpinan Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 14 Januari 2020, pertemuan dalam rangka kelanjutan kerjasama Fraksi PKS DPR dengan Pascasarjana Universitas Sahid.



Aspirasi Warga Desa Jayalaksana Bekasi

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA menerima kunjungan warga Desa Jayalaksana, Cibangubgin Kabupaten Bekasi di ruang Ketua Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 14 Januari 2020, pertemuan dalam rangka Silaturahmi dan sharing dengan Ketua Fraksi PKS DPR RI.

(Foto : Ero)

Aspirasi dari Yayasan Tugas Ibu Jakarta Barat

Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil Jakarta Timur Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si. bersama Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si. menerima aspirasi dari Yayasan Tugas Ibu Jakarta Barat di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI pada Rabu 15 Januari 2020, Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.



PROFIL

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I



Keluarga, Tempat terbaik belajar tentang **Pengorbanan**

Sabtu ini kita hangatkan dengan mengenal sosok Anggota legislatif Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IX Majalengka, Sumedang, dan Subang yaitu Nurhasan Zaidi S.Sos.I.

Suami dari Herliani ini lahir di Bandung, 20 September 1967 dari pasangan H.M.U Zainuddin Qori (almarhum) dan Eti Dawati. Alhamdulillah saat ini telah dikaruniai 6 putra dan 1 putri. Berturut-turut Ahmad Izzudin, Zaid, Muna, Hayyan, Muhammad Danu, Muhammad Daud, Imam.

"Pak Dede", panggilan akrab Nurhasan Zaidi lahir dan

besar di lingkungan madrasah. Kepemimpinan dan karakternya tumbuh dalam "gembelngan" Persatuan Umat Islam (PUI), salah satu ormas Islam berpengaruh di Indonesia.

Mewarisi karakter sang Ayah yang aktif di ormas Persatuan Umat Islam (PUI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI). Belum lama ini dirinya didapuk kembali sebagai Ketua Umum PUI masa khidmat 2019 - 2024. Semoga Amanah.

Sebagaimana dirinya, Nurhasan Zaidi membangun keluarga dengan pondasi utama berdasarkan nilai Islam dan pengajaran. Pak Dede berlatar

belakang seorang guru dan pedagang, keteladanan dan hikmah menjadi napas keseharian yang diterapkan dalam keluarga.

Tenang dan Humoris. Pembawaannya hangat dan low profile. Meski suka humor, tapi juga serius dan penuh semangat ketika menghadapi persoalan keummatan dan kebangsaan.

Baginya keluarga adalah energi perjuangan. Istri sebagai pendamping utama dalam perjuangannya. Komplit insyaAllah.

Pesan Pak Dede untuk keluarga Indonesia "Keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk belajar tentang manisnya cinta dan nikmatnya pengorbanan. Saling memahami adalah kunci, saling memperbaiki adalah energi, saling menjaga diri dan melayani adalah bukti, yang akhirnya akan mengantarkan pada keridhoan Ilahi, InsyaAllah".

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen Nurhasan Zaidi dapat mengikuti social media:

Facebook
Nurhasan Zaidi

Twitter
@Dede_Nurhasan

Instagram
@nurhasanzaidi



”

Saling memahami adalah kunci, saling memperbaiki adalah energi, saling menjaga diri dan melayani adalah bukti, yang akhirnya akan mengantarkan pada keridhoan Ilahi,





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI